



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Tiga Gugatan terkait Pemberhentian PNS Kembali Disidangkan

Jakarta, 16 Januari 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang terhadap tiga permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon pada Rabu (16/1) pukul 11.00 WIB. Ketiga perkara teregistrasi dengan nomor 87/PUU-XVI/2018, diajukan oleh Hendrik; nomor 88/PUU-XVI/2018, diajukan oleh lima pemohon, yaitu Fatah Yasin, Panca Setiadi, Nawawi, Nurlaila, dan Djoko Budiono; dan nomor 91/PUU-XVI/2018, diajukan oleh Novi Valentino, Fatmawati, Markus Iek, Yunius Wuruwu, dan Sakira Zandi. Seluruh Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Norma yang diujikan dalam perkara nomor 87/PUU-XVI/2018 dan 91/PUU-XVI/2018, yaitu:

- **Pasal 87 ayat (2) UU ASN**
“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.”
- **Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN**
“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”

Dalam perkara nomor 88/PUU-XVI/2018, Pemohon hanya mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN.

Pada Kamis (3/12/18) MK menggelar sidang terhadap perkara nomor 91/PUU-XVI/2018 dengan agenda Perbaikan Permohonan. Pada Selasa (11/12/18), MK menggelar sidang pleno perdana terhadap perkara nomor 87/PUU-XVI/2018 dan 88/PUU-XVI/2018 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Adapun pada Selasa (8/1), ketiga perkara disidangkan bersama.

Dalam permohonannya, Pemohon perkara nomor 87/PUU-XVI/2018 mengungkapkan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN dapat menimbulkan pelaksanaan norma yang bersifat subjektif berdasarkan pelaksanaan undang-undang. Selanjutnya, menurut Pemohon, frasa “melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d tidak memuat klasifikasi tindak pidana secara spesifik. Hal tersebut dinilai Pemohon menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan norma.

Sementara itu, Pemohon perkara nomor 88/PUU-XVI/2018 menilai terdapat ketidakadilan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b yang digugatinya. Pemohon menilai perbedaan pemberhentian terhadap ASN yang ditemukan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya dan ASN yang ditemukan melakukan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan jabatannya merupakan hal yang tidak logis. Menurut Pemohon, pasal tersebut tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945.

Selanjutnya, Pemohon perkara nomor 91/PUU-XVI/2018 berpendapat bahwa diperlukan pengujian, pengklasifikasian, dan penelitian terhadap ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan. Pemohon berpendapat bahwa pasal yang diujikan dalam perkara yang diajukannya melampaui kewenangan atau kekuasaannya karena mencabut hak atas pekerjaan seseorang tanpa melalui putusan pengadilan.

Dalam sidang Selasa (8/1) yang salah satu agendanya adalah Mendengarkan Keterangan DPR tersebut, Arteria Dahlan, mewakili Tim Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), secara umum menyanggah gugatan para Pemohon. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, DPR RI berpandangan bahwa keputusan setiap Pemohon untuk menjadi PNS akan serta merta menjadikannya terikat dalam ketentuan-ketentuan birokrasi dan kepatutan untuk menjadi contoh bagi masyarakat. Sehingga, tindakan apapun yang pada dasarnya melanggar nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah selayaknya menerima konsekuensi hukum. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id